



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.279-Bag.Ek/2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DI

KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro di Kota Bandung diperlukan pengembangan sektor ekonomi diantaranya melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong kondisi perekonomian yang akomodatif, kondusif dan sinergis bagi perkembangan iklim usaha di Kota Bandung;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan masukan serta pertimbangan dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sehingga untuk efektifitas dan efisiensinya perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Kelompok Kerja Kebijakan Ekonomi Makro Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Kebijakan Ekonomi Makro Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. menginventarisasi, mengidentifikasi, menelaah dan mengkaji serta menyusun berbagai data dan permasalahan kebijakan ekonomi makro di Kota Bandung;
 3. menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan ekonomi makro di Kota Bandung;
 4. memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam rangka perumusan alternatif pemecahan masalah kebijakan ekonomi makro di Kota Bandung;
 5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep.279-Bag.Ek/2016
TANGGAL : 25 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walkota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Pembiayaan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas
Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan
Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
8. Kepala ...

8. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
11. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001